

ABSTRAK

Budiman Binsar Septiadi Putra (01659210101)

KEDUDUKAN INVESTOR DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA TERKAIT TRANSAKSI REPO ATAS PERUSAHAAN YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

(vii + 113 halaman)

Bahwa dalam dunia bisnis, sering terjadi transaksi-transaksi yang digunakan untuk mempermudah, mempercepat, dan/atau mempersingkat waktu dalam kaitannya dengan keuntungan dalam kegiatan bisnis. Salah satu bentuk transaksi yang digunakan oleh pebisnis adalah transaksi *repurchase agreement*. Transaksi *repurchase agreement* adalah transaksi jual-beli efek dengan janji membeli kembali efek yang sudah dijual tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Ketika transaksi *repurchase agreement* dilakukan, terjadi *first leg* dan *second leg*. Namun posisi dari transaksi repo dan para pihaknya dalam hukum kepailitan di Indonesia belum diatur secara tegas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kedudukan dari transaksi repo dan pihak-pihak dalam transaksi repo dalam hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan penelitian penulis, berdasarkan sifat perjanjiannya, dimana adanya perpindahan uang dan efek dari pembeli kepada penjual, dan adanya perpindahan efek dan uang pada saat *second leg*, maka penulis melihat transaksi repo adalah transaksi pinjam meminjam dengan efek sebagai jaminannya. Dan berdasarkan penelitian penulis, bahwa karena sifatnya sebagai transaksi pinjam meminjam uang dengan saham sebagai jaminan, maka investor atau pembeli dalam transaksi repo masuk sebagai kreditur separatis. Penulis memiliki saran agar hukum kepailitan diperbaharui untuk mengakomodir transaksi yang ada di masyarakat, salah satunya transaksi repo.

Referensi: 55 (1945-2022)

Kata Kunci: transaksi repurchase agreement, pailit

ABSTRACT

Budiman Binsar Septiadi Putra (01659210101)

LEGAL POSITION OF THE INVESTOR IN THE INDONESIAN BANKRUPTCY LAW REGARDING REPO TRANSACTION OF A COMPANY THAT BANKRUPTED

(vii + 113 pages)

In a business world, there are a lot transactions made by businessman/woman in order to fasten, make it simpler, regarding the coup of interests. One of which is repurchase agreement transaction. Repurchase agreement transaction is transaction buying-selling transaction of an effect, whereas the parties agreed to buying back-selling back of the effect and also the interests, which the date is also agreed upon. Repo transaction contains first leg transaction and second leg transaction. But, when the time agreed upon is coming, but the seller could not buy back the effects because the seller is a bankrupt verdict. In the bankrupt applicable law in Indonesia, repo transaction is not regulated by it. The purpose of this study is to see the legal standing of the transaction and also the parties in it. In this study, researcher using Juridical Normative method. Juridical is a method using applicable law and regulation. Normative method is a method that using legal principles and studies & researches that already researched by other researcher. Based on researcher's research, repo transaction is not regulated by bankruptcy applicable law in Indonesia. According to the nature of the transaction, where there are transfer of money and effect in the first leg, and also on the second leg, repo transaction is considered by researcher is debt & receivable transaction, where the effect is considered as assurance. Therefore, the buyer of the repo transaction is considered as separated creditor. Researcher suggest that bankruptcy applicable law in Indonesia needs update, in order to accommodate any new transactions that happen, particularly repo agreement.

References: 55 (1945-2022)

Keywords: transaksi repurchase agreement, pailit